

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual merupakan penjabaran singkat mengenai konsep atau variabel utama dalam penelitian. Definisi ini dirumuskan peneliti berdasarkan kajian dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan literatur relevan, yang digunakan sebagai dasar operasional dalam menjelaskan dan mengukur variabel secara sistematis.

Sebagaimana menurut Lijan Poltak Sinambela dan Sondang Sinambela (2022:123), definisi konseptual adalah definisi yang ditentukan peneliti untuk diteliti dan merupakan kumpulan dari definisi-definisi yang dikaji dari jurnal, buku, serta sumber-sumber lainnya yang relevan sebagai pegangan untuk dioperasionalkan nantinya. (Lijan Poltak Sinambela dan Sondang Sinambela, 2022:123)

1.1.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM sebagai entitas usaha memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Untuk memahami kontribusinya secara menyeluruh, penting untuk mengetahui terlebih dahulu definisi dan ruang lingkup UMKM berdasarkan regulasi yang berlaku serta pandangan para ahli. Berikut ini akan dijelaskan pengertian UMKM, kriteris, karakteristik, dan jenis usaha yang menjadi dasar dalam pembahasan selanjutnya.

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), secara umum merupakan kegiatan usaha produktif yang dibentuk oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal dan hasil penjualan tertentu.

Lebih lanjut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengartikan beberapa definisi tentang UMKM melalui pasal-pasal yang telah disusun. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengategorikan suatu elemen dalam jenis usaha kecil dan menengah, yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

UMKM adalah jenis usaha yang memiliki modal relatif kecil, dikelola secara sederhana, serta melibatkan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari keluarga atau masyarakat sekitar. (Malayu S.P. Hasibuan, 2017:85)

Menurut pendapat lain UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat mendorong pemerataan ekonomi masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. (Dwi Hastuti, 2020:158).

Sedangkan menurut pendapat yang lain UMKM sebagai usaha produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian

nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. (Suryana, 2016:23)

Selain itu, menurut Hidayat (2023:45), Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria UMKM dipisahkan menjadi tiga kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berikut adalah penjelasan UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah:

1) Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2) Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3) Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jumlah besar. (Muhammad Latief, 2018:4)

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dengan modal relatif kecil namun memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga membantu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu terus didukung agar mampu berkembang dan bersaing di era globalisasi saat ini.

2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008, disebutkan kriteria untuk mendefinisikan UMKM adalah melalui nilai kekayaan bersih atau nilai aset belum termasuk dengan nilai tanah atau bangunan tempat usaha dan hasil dari penjualan tahunan usaha.

UMKM biasanya diukur oleh besar kecilnya usaha dan jumlah nilai dari penjualan yang dihasilkan. Namun, sejumlah Lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan pembeda antar UMKM sesuai dengan ciri dan bentuk dari usaha. Berdasarkan dari sudut pandang usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu terdiri dari:

- 1) UMKM Sektor Informal atau *Livelihood Activites* merupakan usaha yang tidak resmi dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Sektor informal biasanya berbentuk usaha kecil seperti pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro merupakan pelaku UMKM yang memiliki sifat pengrajin namun dalam mengembangkan usahanya belum memiliki jiwa kewirausahaan.
- 3) Usaha Kecil Dinamis merupakan UMKM yang mampu berwirausaha dengan melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan melakukan kegiatan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterpr.rise* merupakan UMKM yang telah berkembang pesat dan memiliki kapasitas manajerial, permodalan, serta kemampuan kewirausahaan yang kuat sehingga siap bertransformasi menjadi usaha besar. (Lathifah Hanim, 2018:29)

4. Jenis Usaha UMKM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1998, UMKM diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang

perlu dilindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam satu dekade terakhir, berbagai jenis usaha UMKM berkembang pesat, mulai dari skala rumah tangga hingga usaha dengan cakupan yang lebih luas.

Adapun beberapa contoh jenis usaha yang termasuk kategori UMKM adalah sebagai berikut:

1) Kuliner

Usaha kuliner merupakan salah satu bidang UMKM yang banyak diminati, termasuk oleh kalangan muda. Dengan modal yang relatif terjangkau dan inovasi produk makanan yang beragam, bisnis kuliner memiliki prospek yang baik karena makanan merupakan kebutuhan primer manusia.

2) *Fashion*

Selain makanan, usaha di bidang *fashion* juga sangat digemari. Setiap tahunnya, tren mode *fashion* selalu berubah, sehingga membuka peluang keuntungan bagi pelaku UMKM di sektor ini.

3) Agribisnis

Usaha di sektor agribisnis, khususnya pertanian, umumnya membutuhkan lahan yang cukup luas. Namun demikian, lahan pekarangan rumah juga dapat dimanfaatkan untuk usaha agribisnis skala kecil yang menguntungkan.

4) Perdagangan

UMKM di bidang perdagangan mencakup usaha seperti penjualan bahan bangunan, alat-alat listrik, mainan anak-anak, sembako, dan sebagainya.

5) Makanan dan Minuman (Mamin)

Jenis UMKM ini meliputi usaha produksi kue kering, minuman kemasan, olahan daging seperti bakso, dan produk sejenis lainnya yang semakin banyak digeluti masyarakat.

6) Kerajinan Tangan (*Handycraft*)

Usaha kerajinan tangan banyak dijalankan oleh ibu rumah tangga karena fleksibel dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contoh produk *handycraft* yang laku di pasaran antara lain sepatu rajut, wadah tisu dari flanel, bros kain perca, dan lain-lain.

7) Pendidikan

Bidang pendidikan juga termasuk UMKM, misalnya usaha bimbingan belajar (bimbel) yang membantu anak-anak dalam meningkatkan kemampuan akademiknya di luar sekolah formal.

8) Otomotif

Usaha otomotif dapat berupa penjualan suku cadang (*spare part*), jasa cuci motor dan mobil, atau penjualan perlengkapan keselamatan berkendara seperti helm dan jaket berstandar SNI.

9) Teknologi Internet

Di era digital saat ini, usaha berbasis internet memiliki prospek menjanjikan karena hampir semua orang membutuhkan akses internet untuk memperoleh informasi maupun hiburan.

10) Elektronik dan *Gadget*

Kemajuan teknologi digital memicu tingginya permintaan terhadap *gadget* dan perangkat elektronik. Usaha di bidang ini meliputi penjualan *smartphone*, laptop, dan aksesoris pendukungnya.

11) Perizinan

Usaha jasa perizinan meliputi pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (pajak, perpanjangan STNK, balik nama), serta perizinan mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah maupun perusahaan, dengan keuntungan berasal dari biaya jasa yang diberikan.

12) Katering

Usaha katering memiliki potensi besar, terutama jika menjalin kerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan penyedia makanan bagi karyawannya. Katering untuk acara pernikahan dan hajatan juga merupakan peluang usaha yang menguntungkan.

13) Pertanian dan Peternakan

Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga mendukung berkembangnya usaha pertanian dan peternakan, seperti padi, sayuran, buah-buahan, serta peternakan ayam, kambing, dan sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

14) Properti

Bisnis properti selalu memiliki prospek baik karena rumah merupakan kebutuhan primer manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan hunian pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

15) Kelontong

Usaha toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan sasaran utama ibu rumah tangga, anak-anak, hingga bapak-bapak di sekitar lokasi toko.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki jenis yang beragam dengan cakupan bidang usaha yang luas, mulai dari kuliner, fashion, perdagangan, hingga teknologi dan properti. Keberagaman sektor UMKM ini menunjukkan potensinya dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan.

Salah satu contoh nyata adalah Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura, yang menjadi objek penelitian ini. Toko tersebut termasuk dalam kategori UMKM di bidang makanan dan minuman (mamin) karena bergerak di usaha produksi kue tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Dengan memahami jenis UMKM, diharapkan penelitian ini dapat membantu menggambarkan kondisi *real* usaha di sektor mamin, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan.

2.1.2. Akuntansi

Dalam kegiatan usaha, termasuk pada sektor UMKM, akuntansi memegang peran penting sebagai alat bantu dalam mencatat dan mengelola informasi keuangan. Pemahaman tentang akuntansi menjadi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, sebelum membahas penerapan SAK EMKM pada UMKM, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian akuntansi secara umum.

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing yaitu *accounting*, yang artinya bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi pada dasarnya adalah suatu proses yang mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukannya untuk pengambilan keputusan maupun tujuan lainnya. Dalam praktiknya, akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang memuat transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, seperti pembelian barang dagang, penjualan barang, pembayaran utang, hingga pembayaran gaji karyawan. Oleh sebab itu, akuntansi berfungsi untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, melaporkan, dan menafsirkan data ekonomi dalam suatu sistem ekonomi sosial.

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, menyimpan, serta memproses transaksi ekonomi untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. (Romney dan Steinbart, 2020:10)

Kuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pemangku kepentingan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, akuntansi memberikan informasi keuangan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Warren, Reeve dan Duchac, 2018:10)

Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan non keuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak- pihak lain yang terkait dengan perusahaan. (Catur Sasongko dkk, 2016:2)

Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Senada dengan itu, Sugiarto (2022:4) menyebutkan bahwa akuntansi mempunyai hubungan erat dengan proses pencatatan, pemilihan, dan pengikhtisaran data transaksi entitas (unit ekonomi), serta penafsiran hasilnya. Data tersebut sebagian besar mencakup masalah keuangan dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Akuntansi juga mencakup masalah pelaporan dan penafsiran data. (Sumarlin, 2019:2)

Akuntansi dalam SAK EMKM adalah kebijakan yang mencakup pemilihan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi sederhana yang sesuai dengan karakteristik entitas mikro, kecil, dan menengah, yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan konsep entitas terpisah dan pengukuran berbasis biaya historis. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018:2)

Akuntansi merupakan serangkaian aktivitas sistematis yang mencakup pengumpulan, pencatatan, analisis, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas ekonomi, dengan tujuan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Akuntansi juga sering disebut sebagai “bahasa bisnis” karena informasi yang dihasilkan hanya dapat dipahami jika pengguna memahami mekanisme akuntansi yang digunakan. Sistem ini dirancang agar transaksi yang dicatat menjadi informasi finansial yang bermanfaat dan akurat bagi pemakainya. (Galih Wicaksono, 2022:3)

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi dan proses terstruktur yang bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, meringkas, serta menyajikan data transaksi keuangan suatu entitas secara sistematis. Proses ini menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti manajemen, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mengambil keputusan yang tepat. Akuntansi juga disebut sebagai “bahasa bisnis” karena mampu mengkomunikasikan kondisi keuangan dan aktivitas ekonomi suatu entitas secara jelas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks UMKM, akuntansi disederhanakan melalui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018), yang menekan

pada kemudahan, kesederhanaan, dan relevansi informasi keuangan. Standar ini mencakup tiga laporan utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta menggunakan prinsip entitas terpisah dan pengukuran berbasis biaya historis sebagai dasar penyusunan laporan. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengelolaan usaha secara akuntabel dan berkelanjutan, termasuk pada sektor usaha mikro dan kecil. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

2. Prinsip Dasar Akuntansi

Menurut Adrian Radiansyah, dkk (2023:45) dalam buku Teori dan Konsep Dasar Akuntansi di Berbagai Sektor, terdapat beberapa prinsip dasar akuntansi yang menjadi fondasi penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1) Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga seluruh transaksi bisnis yang dicatat hanya mencakup aktivitas ekonomi perusahaan tanpa dicampur dengan transaksi pribadi pemilik.

2) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

Prinsip ini mengharuskan semua aset dicatat berdasarkan biaya perolehan pada saat transaksi terjadi, termasuk biaya tambahan seperti ongkos kirim atau instalasi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini.

3) Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern Principle*)

Prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus menjalankan usahanya dalam jangka panjang, kecuali jika terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan perusahaan harus berhenti beroperasi.

4) Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)

Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan harus memuat seluruh informasi yang relevan dan diperlukan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat, secara jelas dan menyeluruh.

5) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan harus diakui ketika transaksi penjualan barang atau jasa telah terjadi, tanpa menunggu kas diterima, sesuai periode akuntansi yang berlaku.

6) Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Prinsip ini mengharuskan biaya yang terjadi pada periode tertentu diakui bersamaan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama, agar laba rugi dapat dihitung secara akurat.

7) Prinsip Periode Akuntansi (*Accounting Period Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, guna mempermudah analisis kinerja perusahaan dalam periode tersebut.

8) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa metode atau prosedur akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan.

9) Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit Principle*)

Prinsip ini mewajibkan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dalam satuan mata uang yang sama untuk memudahkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

10) Prinsip Materialitas (*Materiality Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap informasi keuangan yang dianggap material atau signifikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. (Adrian Radiansyah, dkk, 2023:45)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar akuntansi merupakan pedoman penting yang memastikan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara objektif, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip ini akan membantu UMKM, termasuk Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan berguna untuk pengambilan keputusan usaha ke depan.

3. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi mencakup rangkaian langkah sistematis mulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan tahap penutupan akhir periode.

Siklus akuntansi adalah tahapan berulang setiap periode akuntansi yang mencakup identifikasi transaksi, pencatatan, posting buku besar, penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, hingga penutupan buku.

Langkah-langkah tipikal dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Transaksi

Menentukan setiap kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan entitas dan memenuhi kriteria dapat diukur secara objektif.

2) Pencatatan Transaksi

Pencatatan dilakukan dalam jurnal umum atau jurnal khusus dengan sistem *double-entry*.

3) Posting ke Buku Besar (*Ledger*)

Memindahkan informasi dari jurnal ke akun-akun dalam buku besar untuk setiap jenis akun.

4) Penyusunan Neraca Saldo (*Trial Balance*)

Menghitung saldo akun pada akhir periode untuk mendeteksi keseimbangan debit dan kredit.

5) Ayat Penyesuaian (*Adjusting Entries*)

Mencatat transaksi yang belum diakui atau perlu diperbarui pada akhir periode (misalnya depresiasi, akrual, dan persediaan).

6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Menyusun ulang neraca saldo setelah penyesuaian untuk memastikan keseimbangan sebelum laporan keuangan.

7) Penyusunan Laporan Keuangan

Menyusun laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan.

8) Jurnal Penutup (*Closing Entries*)

Menutup akun-akun nominal untuk memulai periode baru (memindahkan saldo ke modal atau laba ditahan).

9) Neraca Saldo Setelah Penutupan (*Post-Closing Trial Balance*)

Hanya mencakup akun permanen (aset, kewajiban, modal), menampilkan saldo setelah semua akun nominal ditutup.

10) Jurnal Pembalik (*Reversing Entries*) (*opsional*)

Membalik ayat penyesuaian pendapatan atau pengeluaran tertentu agar lebih mudah dalam pencatatan periode berikutnya.

Siklus akuntansi merupakan rangkaian langkah sistematis yang dimulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan jurnal pembalik. Setiap tahap memiliki tujuan agar informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemahaman mendalam tentang siklus ini sangat penting bagi akuntan dalam menjalankan fungsinya secara profesional. (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2021:413- 416)

2.1.3. Fungsi, Manfaat dan Peran Akuntansi dalam Pengelolaan UMKM

Akuntansi memiliki peranan penting dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam hal pengelolaan

keuangan yang lebih sistematis dan transparan. Dalam konteks UMKM, akuntansi bukan hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem informasi keuangan yang mendukung proses pengambilan keputusan strategis bagi pelaku usaha.

Fungsi utama akuntansi bagi UMKM meliputi:

1. Mencatat transaksi usaha secara sistematis agar semua kegiatan ekonomi terekam dengan baik.
2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk mengevaluasi kinerja usaha dari waktu ke waktu.
3. Menjadi dasar perhitungan dan pelaporan pajak secara sah dan benar.
4. Alat perencanaan dan pengendalian usaha, terutama dalam menentukan anggaran dan strategi usaha di masa mendatang. (Siti Rahayu, 2012:3)

Akuntansi memiliki manfaat praktis bagi pelaku UMKM, antara lain:

1. Memudahkan pemantauan posisi keuangan seperti laba/rugi, utang/piutang, dan arus kas.

2. Menjadi alat bantu pemisahan keuangan pribadi dan usaha, sehingga menghindari pencampuran dana yang bisa merugikan.
3. Membantu menyusun anggaran dan rencana keuangan yang lebih realistis.
4. Memudahkan pengajuan kredit dan kerja sama dengan pihak eksternal.
5. Meningkatkan kemampuan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak lain, seperti investor, mitra, atau lembaga pembiayaan. (Muhammad Farhan dkk, 2020:48)

Selanjutnya, akuntansi juga berfungsi sebagai:

1. Alat perencanaan dan pengambilan keputusan internal, khususnya dalam menentukan arah usaha, pengendalian biaya, dan manajemen persediaan.
2. Alat untuk memenuhi tuntutan eksternal, seperti pelaporan kepada pihak pemerintah, perbankan, atau lembaga pendukung UMKM.
3. Secara umum, fungsi dan peran akuntansi dalam pengelolaan UMKM mencakup:
 - 1) Pencatatan (*recording*): mencatat seluruh transaksi keuangan secara sistematis.
 - 2) Pengklasifikasian (*classifying*): mengelompokkan data transaksi berdasarkan jenisnya.
 - 3) Peringkasan (*summarizing*): merangkum data keuangan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami.
 - 4) Pelaporan (*reporting*): menyajikan informasi keuangan untuk berbagai pihak terkait.
 - 5) Analisis (*analyzing*): memberikan gambaran yang objektif terhadap kondisi keuangan usaha.

Bagi pelaku usaha seperti Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura, pemahaman terhadap fungsi dan manfaat akuntansi menjadi dasar penting dalam mengelola usaha secara profesional. Akuntansi membantu pemilik usaha mengetahui secara pasti seberapa besar keuntungan yang diperoleh, berapa banyak biaya yang dikeluarkan, dan apa yang perlu diperbaiki dalam strategi keuangan. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya memberikan gambaran masa lalu dan sekarang, tetapi juga menjadi alat bantu dalam merencanakan masa depan usaha yang lebih baik dan berkelanjutan. (Sri Rahayu Yulianti dan M. Arifin, 2019:174–175)

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyadari bahwa mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Permasalahan yang umum ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur, serta belum adanya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, IAI menetapkan SAK EMKM, yang merupakan standar resmi dan secara khusus disusun untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM bertujuan menyediakan pedoman akuntansi yang sederhana, relevan, dan andal, sesuai dengan karakteristik dan kapasitas UMKM yang memiliki keterbatasan dalam aspek pencatatan keuangan.

Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan hingga saat ini belum mengalami revisi atau diterbitkan dalam versi baru.

SAK 2021 atau 2023 bukan merupakan versi revisi dari SAK EMKM, melainkan merupakan kompilasi Standar Akuntansi Keuangan Umum dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga tidak secara khusus mengatur tentang SAK EMKM. Oleh karena itu, dalam konteks UMKM seperti Toko Mak Naura, SAK EMKM 2018 tetap menjadi acuan yang paling relevan dan tepat dalam menyusun laporan keuangan usaha kecil dan mikro.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup SAK EMKM

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:2), SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan dan yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini dirancang lebih sederhana daripada SAK ETAP dan mengatur transaksi-transaksi umum yang sering terjadi dalam kegiatan UMKM.

SAK EMKM menggunakan dasar pengukuran biaya historis, memisahkan entitas usaha dari keuangan pribadi pemilik, serta hanya mewajibkan penyusunan tiga laporan utama, yaitu:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca),
- 2) Laporan Laba Rugi,
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

SAK EMKM disahkan pada 24 Oktober 2016 dan diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2018. Standar ini hanya dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan telah memenuhi klasifikasi usaha mikro, kecil, atau menengah selama minimal dua tahun berturut-turut.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan atau beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperkenankan menggunakan standar tidak diperkenankan menggunakan standar ini dan wajib menggunakan SAK Umum atau standar lainnya yang relevan sesuai sektor usaha dan tuntutan akuntabilitas publik.

SAK EMKM bersifat *stand-alone*, artinya pelaku UMKM tidak perlu merujuk ke standar akuntansi lainnya, seperti SAK ETAP atau PSAK. Hal ini sangat membantu pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan akses pelatihan, karena cukup fokus pada satu standar yang telah dirancang khusus untuk kebutuhan mereka. Dengan struktur yang sederhana dan penggunaan istilah yang lebih umum, SAK EMKM mendorong praktik akuntansi yang lebih mudah diterapkan di lapangan.

Standar ini dirancang berdasarkan konsep entitas *teRpisah*, artinya laporan keuangan UMKM hanya mencerminkan kondisi keuangan usaha, bukan keuangan pribadi pemilik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan. Selain itu, SAK EMKM menggunakan dasar akrual dalam pencatatan dan pengukuran

dengan biaya historis, sehingga laporan mencerminkan transaksi aktual tanpa penyesuaian nilai wajar yang kompleks.

Dengan menggunakan SAK EMKM, UMKM dapat menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi standar minimum untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal;
- 2) Memberikan informasi keuangan yang jelas dan terstruktur kepada investor atau mitra usaha;
- 3) Menjadi alat evaluasi kinerja usaha untuk kepentingan internal pemilik;
- 4) Mendukung kepatuhan dalam pelaporan pajak dan legalitas usaha.

Di tengah tuntutan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, penerapan SAK EMKM juga membuka peluang UMKM untuk naik kelas menuju usaha yang lebih mapan dan terintegrasi ke dalam sistem keuangan nasional.

2. Tujuan dan Manfaat SAK EMKM Bagi UMKM

- 1) Tujuan SAK EMKM:

SAK EMKM disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai bentuk komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM dengan pendekatan yang sederhana dan aplikatif. Tujuan utama dari diterapkannya SAK EMKM, antara lain:

- a. Menyederhanakan proses pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga dapat diterapkan oleh UMKM yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, teknologi, dan pemahaman akuntansi.
- b. Meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh UMKM agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan terukur.
- c. Membantu UMKM mengakses pembiayaan eksternal seperti pinjaman dari perbankan, koperasi, atau investor, melalui laporan keuangan yang disusun secara lebih profesional.
- d. Mendorong pemisahan keuangan pribadi dan usaha, yang penting untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- e. Mewujudkan transparansi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan UMKM, baik dari pihak internal maupun eksternal.

2) Manfaat SAK EMKM bagi UMKM:

Dengan menerapkan SAK EMKM, pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat nyata dalam pengelolaan usaha mereka, antara lain:

- a. Kemudahan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi tingkat lanjut.
- b. Kemampuan memantau kondisi keuangan usaha, seperti laba rugi, arus kas, dan perubahan modal, secara berkala.

- c. Dokumen resmi yang dapat digunakan untuk pelaporan pajak, pengajuan pinjaman, dan kerja sama usaha.
- d. Penguatan tata kelola keuangan, melalui pemisahan dana usaha dan dana pribadi, serta pengendalian terhadap penggunaan dana operasional.
- e. Meningkatkan daya saing dan profesionalitas UMKM, khususnya dalam menghadapi persaingan pasar yang menuntut efisiensi dan transparansi.

3. Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

1) Laporan Laba Rugi

Menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun berikut ini:

- (a) Pendapatan
- (b) Beban keuangan
- (c) Beban pajak

Kemudian dikatakan bahwa laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Sementara itu, laporan perubahan modal merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan aktiva atau kekayaan pada suatu perusahaan.

2) Neraca atau Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Menurut SAK EMKM dikatakan bahwa laporan posisi keuangan terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Kemudian dikatakan bahwa SAK EMKM tidak menentukan susunan atas akun-akun yang disajikan. Walaupun tidak ditentukan susunannya, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat:

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- (c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Kemudian SAK EMKM menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Tiap-tiap akun didalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Penerapan SAK EMKM 2018 menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan dan profesionalitas pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia. Standar ini memberikan kerangka sederhana namun komprehensif untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Bagi UMKM seperti Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura, penerapan SAK EMKM merupakan langkah awal untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan, memahami posisi keuangan secara lebih akurat, serta membuka peluang lebih besar dalam mengakses pembiayaan dan kemitraan bisnis jangka panjang. Dengan memahami dan menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai standar meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan, UMKM dapat membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

1.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sebelumnya yang mendukung pentingnya penerapan akuntansi sederhana melalui SAK EMKM pada UMKM. Hasil-hasil penelitian terdahulu berikut memberikan dasar empiris yang memperkuat argumen dan arah penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Nugroho dan Sri Putri Handayani. 2020	Implementasi SAK EMKM pada UMKM Kuliner di Kota Semarang	<p>Ditemukan bahwa faktor utama penghambat penerapan akuntansi adalah pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha, serta ketidakmampuan pelaku usaha membaca laporan keuangan.</p> <p>Relevansi: Mendukung fokus penelitian pada hambatan penerapan akuntansi dan pentingnya pemisahan keuangan usaha.</p>
2.	Dewi Astuti dan Rahmawati Nuraini. 2019	Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Yogyakarta	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai standar. Penyebab utamanya adalah keterbatasan pengetahuan akuntansi dan belum adanya pendampingan teknis. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan penerapan SAK EMKM secara bertahap.</p>

			<p>Relevansi: Menjelaskan kondisi umum pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan keuangan secara manual dan sederhana, sebagaimana yang terjadi pada Toko Mak Naura.</p>
3.	Dina Fitriani dan Rizky Hartono. 2021	Evaluasi Pemahaman dan Penerapan SAK EMKM oleh UMKM di Surakarta	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian UMKM memiliki kemauan untuk belajar dan menerapkan SAK EMKM, namun minimnya literasi digital dan pendampingan menjadi tantangan besar.</p> <p>Relevansi: Menegaskan pentingnya strategi pendampingan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya perbaikan implementasi SAK EMKM.</p>
4.	Mardiasmo. 2018	Akuntansi Sektor Publik	<p>Mardiasmo menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang benar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan usaha, termasuk di sektor mikro dan kecil.</p> <p>Relevansi: Memberi landasan teoritis bahwa akuntansi sederhana dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan daya saing UMKM.</p>
5.	Sinta Rahayu dan Tri Kurniawan. 2022	Penerapan SAK EMKM dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM di Kota Bandung	<p>Penelitian ini menunjukkan UMKM yang menerapkan pencatatan berbasis SAK EMKM memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam hal akses pembiayaan.</p>

			<p>Relevansi: Menyediakan bukti bahwa SAK EMKM berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan pertumbuhan usaha kecil.</p>
--	--	--	---

Sumber: Peneliti, 2025 (data diolah)

1.3. Kerangka Berfikir

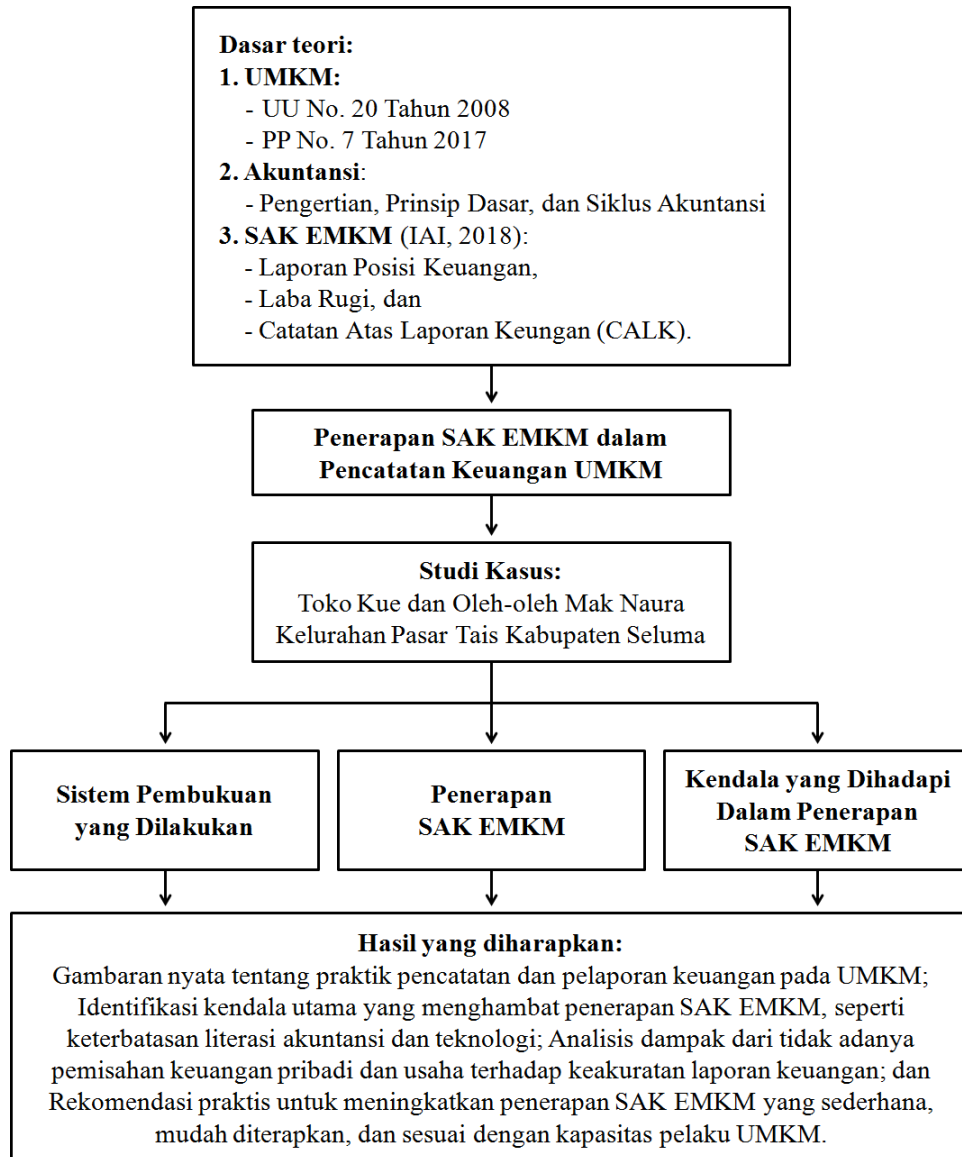
Kerangka berfikir penelitian ini menggambarkan alur logis antara teori, permasalahan, dan hasil yang diharapkan. Fokusnya adalah pada penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM dalam UMKM, khususnya kondisi pencatatan keuangan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan melalui studi kasus di Toko Mak Naura, Pasar Tais Kabupaten Seluma.

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan logis antara teori, hasil penelitian sebelumnya, serta rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka berfikir membantu peneliti menjelaskan arah berfikir dalam mengkaji suatu fenomena secara sistematis. (Sugiyono, 2022:93)

Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa Kerangka berfikir merupakan sintesis logis dari teori dan konsep yang digunakan untuk membangun dasar interpretasi data, yang menjembatani antara kajian literatur dan pelaksanaan penelitian lapangan. (Creswell dan Creswell, 2023:52)

Adapun kerangka berfikir penelitian ini ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Diadaptasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dan hasil olahan peneliti, 2025

Keterangan gambar

Kerangka berfikir pada gambar di atas menggambarkan alur logis penelitian yang menjelaskan hubungan antara teori dasar, implementasi SAK EMKM pada studi kasus, serta hasil yang diharapkan dari penelitian. Secara garis besar, kerangka ini menunjukkan bagaimana teori akuntansi dan kebijakan UMKM diterapkan dalam konteks real pada Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura di Kabupaten Seluma.

Dasar Teori

Bagian pertama menjelaskan fondasi konseptual dari penelitian ini, yang terdiri atas tiga komponen utama:

1. Teori UMKM

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan definisi, kriteria, dan klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Teori ini menjadi dasar untuk memahami karakteristik usaha kecil seperti Toko Mak Naura, terutama dari sisi skala usaha, modal, dan peranannya dalam perekonomian daerah.

2. Teori Akuntansi

Menjelaskan pengertian, prinsip dasar, dan siklus akuntansi sebagai proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Di sini juga dijelaskan prinsip entitas usaha (*business entity concept*) yang menekankan pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai syarat penting agar laporan keuangan valid dan objektif.

3. SAK EMKM

Standar akuntansi khusus untuk UMKM yang mengatur penyusunan tiga laporan utama:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

SAK EMKM dirancang agar sederhana, mudah diterapkan, dan akuntabel, sehingga dapat digunakan oleh UMKM yang belum memiliki kemampuan teknis akuntansi yang tinggi. (IAI, 2018)

Penerapan SAK EMKM dalam Pencatatan Keuangan UMKM

Bagian ini menjelaskan bagaimana teori dan standar akuntansi tersebut diimplementasikan dalam praktik nyata. SAK EMKM menjadi pedoman bagi UMKM dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sederhana, tetapi tetap sesuai standar. Penerapan standar ini menjadi inti penelitian, di mana peneliti menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip SAK EMKM telah dipahami dan diterapkan dalam aktivitas usaha kecil.

Studi Kasus: Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura

Tahap ini menjelaskan objek penelitian, yaitu Toko Kue dan Oleh-Oleh Mak Naura yang berlokasi di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma. Usaha ini dijadikan studi kasus karena menggambarkan situasi nyata UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- Pencatatan keuangan masih manual;
- Belum ada laporan keuangan formal;
- Tidak ada pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha;
- Rendahnya pemahaman terhadap SAK EMKM.

Melalui studi kasus ini, peneliti dapat menganalisis praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Fokus Analisis Penelitian

Kerangka berfikir ini kemudian menguraikan tiga fokus utama penelitian yang selaras dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Sistem Pembukuan yang Dilakukan

Meneliti bagaimana Toko Mak Naura melakukan pencatatan transaksi sehari-hari, termasuk kelengkapan bukti transaksi dan bentuk pembukuan yang digunakan.

2. Penerapan SAK EMKM

Menganalisis sejauh mana pembukuan tersebut telah sesuai dengan standar SAK EMKM, khususnya dalam hal penyusunan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

3. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAK EMKM

Mengidentifikasi hambatan yang muncul, seperti keterbatasan literasi akuntansi, minimnya teknologi, dan tidak adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha.

Hasil yang Diharapkan

Bagian akhir kerangka berfikir menggambarkan *output konseptual* dari penelitian, yaitu:

- Memberikan gambaran nyata tentang praktik pencatatan dan pelaporan keuangan di UMKM.
- Menghasilkan identifikasi kendala utama yang menghambat penerapan SAK EMKM.
- Menunjukkan dampak tidak adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha terhadap keakuratan laporan keuangan.
- Menyusun rekomendasi praktis untuk penerapan SAK EMKM yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM.

Dengan demikian, kerangka berfikir ini menunjukkan bahwa penelitian dimulai dari dasar teori yang kuat tentang UMKM, akuntansi, dan SAK EMKM; kemudian diterapkan secara kontekstual pada Toko Mak Naura; dan berujung pada analisis penerapan, kendala, serta rekomendasi praktis yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas keuangan UMKM di daerah.

